

HAMBATAN UNICEF DALAM MEMENUHI HAK PENDIDIKAN ANAK DI AFGHANISTAN TAHUN 2021-2023

Jahrotun Nufus¹, Frentika Wahyu Retnowatik²

Abstract: *This research aims to explain and describe the obstacles faced by UNICEF in implementing its programs from 2021 to 2023. The issue of education in Afghanistan has persisted since the three-decade-long conflict. The Taliban's takeover further worsened the educational situation in Afghanistan. Although UNICEF strives to improve access to education, existing barriers reduce the effectiveness of its efforts. This research employs a qualitative descriptive approach using data sources from literature studies and qualitative data analysis techniques.*

Using international organization theory, the research findings show that UNICEF has developed several programs to ensure children receive quality education, such as the Basic Education Program, Back to School, Education in Emergencies, and Girls' Access to Education. However, these programs face various obstacles, including Afghanistan's poor security conditions, the Taliban's ban on girls' education, funding shortages due to the cessation of international aid, inadequate infrastructure, distrust of international organizations, and strong social stigma against girls' education.

Keywords: *UNICEF, Children's Right to Education, Afghanistan*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar anak yang diakui secara internasional dan tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 26 dan Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 28. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu, tetapi juga berperan penting dalam membentuk masyarakat yang lebih maju, mendorong kemajuan ekonomi, memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil, sehat, dan seimbang dalam segala aspek kehidupan. Namun, hak atas pendidikan sering kali terancam di negara-negara yang mengalami konflik atau ketidakstabilan politik. Afghanistan sebagai salah satu negara yang terus berkonflik, menghadapi tantangan serius dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh warganya, terutama anak-anak.

Sebelum Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, Afghanistan sempat mengalami peningkatan signifikan dalam akses pendidikan. Menurut Bank Dunia jumlah anak-anak yang terdaftar di sekolah dasar meningkat dari 1 juta pada tahun 2001 menjadi sekitar 9,2 juta pada tahun 2020, dengan sekitar 39% dari jumlah tersebut adalah anak perempuan (World Bank, 2020). Hal ini merupakan hasil dari berbagai upaya internasional, termasuk dukungan dari

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : nfsjaraa@gmail.com.

² Staf Pengajar pada Prodi Hubungan Internasional, FISIPOL, UNMUL, Email: frentika.retnowatik@fisip.unmul.ac.id

organisasi-organisasi seperti UNICEF yang telah bekerja sama dengan pemerintah Afghanistan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menyediakan fasilitas pendidikan, pelatihan guru, dan kurikulum yang lebih inklusif. Namun ketidakstabilan sosial yang terjadi di Afghanistan seperti kekerasan, ancaman dari kelompok-kelompok radikal, dan ketegangan etnis di berbagai daerah juga turut memperburuk akses dan kualitas pendidikan. Sekolah-sekolah menjadi sasaran serangan oleh kelompok militan, yang semakin menambah ketakutan di kalangan siswa dan guru.

Setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada Agustus 2021, situasi pendidikan di Afghanistan memburuk secara drastis. Meskipun sebelum periode tersebut Afghanistan telah mencatat kemajuan yang signifikan dalam memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak perempuan, Taliban memberlakukan serangkaian kebijakan yang membatasi pergerakan perempuan termasuk pendidikan anak perempuan untuk tidak melanjutkan pendidikan setelah kelas 6. Menurut laporan UNICEF, lebih dari 1,1 juta anak perempuan di atas usia 12 tahun kehilangan akses ke pendidikan formal setelah pemerintah Taliban memberlakukan larangan pendidikan bagi anak perempuan di tingkat menengah ke atas pada akhir tahun 2021. Sebagai akibatnya, persentase anak-anak yang terdaftar di sekolah mengalami penurunan tajam, terutama di daerah pedesaan yang dikuasai oleh Taliban (UNICEF, 2021). Taliban juga memperkenalkan kurikulum berbasis syariah dengan interpretasi Taliban yang memperbanyak materi keagamaan dan menghilangkan beberapa materi dari kurikulum sebelumnya seperti seni formal, pendidikan kewarganegaraan, dan budaya (SIGAR, 2023). Laporan dari Human Rights Watch menunjukkan bahwa kebijakan ini secara langsung bertentangan dengan konvensi-konvensi internasional tentang hak pendidikan yang telah diratifikasi Afghanistan, dan dampaknya sangat merugikan anak-anak Afghanistan. (Human Rights Watch, 2022).

Karena pelanggaran-pelanggaran hak oleh Taliban inilah membuat beberapa negara dan organisasi internasional seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan WHO menarik atau menanggukkan dana bantuan pendidikan untuk Afghanistan yang membuat situasi pendidikan di Afghanistan semakin terpuruk. Hal ini mengakibatkan terbatasnya akses pendidikan bagi anak-anak, terutama perempuan, yang dilarang untuk melanjutkan pendidikan. Kebijakan Taliban yang mengekang hak-hak dasar ini memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di Afghanistan, serta menghambat perkembangan generasi muda yang seharusnya dapat berkontribusi untuk masa depan negara tersebut.

Merespon pelanggaran hak-hak anak oleh Taliban tersebut membuat UNICEF turut berperan dalam mengatasi masalah tersebut. *United Nations Internasional Children's Emergency Fund* (UNICEF) merupakan organisasi internasional di bawah naungan PBB yang dibentuk pada 11 Desember 1946 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. UNICEF telah berada di Afghanistan sejak tahun 1949. UNICEF berperan dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas bagi anak-anak di Afghanistan.

Sebagai badan PBB yang berfokus pada hak-hak anak, UNICEF telah lama terlibat dalam upaya mempromosikan akses pendidikan bagi anak-anak Afghanistan, bahkan sebelum pengambilalihan Taliban. Setelah Taliban kembali berkuasa, UNICEF menyesuaikan pendekatannya untuk memastikan bahwa anak-anak, terutama anak perempuan, masih memiliki akses ke pendidikan. UNICEF bekerja sama dengan organisasi internasional dan mitra lokal untuk menyediakan program pendidikan darurat, seperti sekolah-sekolah sementara dan distribusi alat-alat pembelajaran. Salah satu upaya yang paling penting adalah pengenalan program "*Community-Based Education*" (CBE), yang memungkinkan anak-anak belajar di lingkungan yang lebih kecil dan lebih terjamin keamanannya. CBE ini dirancang untuk menjangkau anak-anak di daerah-daerah terpencil atau pedesaan (UNICEF Afghanistan, 2023).

Selain itu, UNICEF juga berupaya mempromosikan program pembelajaran jarak jauh, baik melalui platform daring maupun radio, untuk menjangkau anak-anak yang tidak dapat bersekolah secara fisik. Meskipun demikian, pelaksanaan program ini sering kali terhambat oleh kurangnya akses internet dan infrastruktur teknologi yang tidak memadai di banyak wilayah Afghanistan, serta ketidakmampuan banyak keluarga untuk menyediakan perangkat digital untuk anak-anak mereka.

Dalam situasi hukum dan keamanan yang tidak stabil ini, UNICEF dan organisasi lainnya dihadapkan dengan tantangan logistik, seperti terbatasnya akses ke daerah-daerah tertentu, hambatan transportasi, serta ancaman terhadap keselamatan staf lapangan. Selain itu, terdapat tekanan sosial dan budaya yang kuat yang mendukung pembatasan gender dalam pendidikan (UN, 2024). Dampak dari kebijakan ini tidak hanya membatasi akses terhadap pendidikan namun juga melahirkan ketidakpastian ekonomi dan sosial jangka panjang di kemudian hari. UNICEF bersama dengan mitra internasional telah mengusulkan serangkaian intervensi untuk memitigasi dampak dari kebijakan ini. Termasuk dengan pembangunan sekolah-sekolah alternatif di lokasi-lokasi tertentu di mana anak perempuan masih mendapatkan akses terbatas ke pendidikan (UNICEF, 2021). Bagaimanapun, upaya tersebut memerlukan dukungan yang signifikan dari komunitas internasional untuk dilaksanakan secara efektif.

Namun kenyataannya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh UNICEF ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan berbagai hambatan yang dihadapi oleh UNICEF setelah peralihan kekuasaan oleh Taliban pada tahun 2021. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang menyebabkan program yang dilaksanakan menjadi kurang maksimal. Isu ini menarik bagi penulis untuk diteliti lebih lanjut mengenai hambatan yang dihadapi UNICEF dalam memenuhi hak pendidikan anak di Afghanistan setelah peralihan kekuasaan oleh Taliban yaitu pada tahun 2021-2023.

Kerangka Teori

Tulisan ini menggunakan teori organisasi internasional untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas. Organisasi internasional adalah entitas yang dibentuk oleh dua atau lebih negara atau aktor-aktor internasional lainnya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang melampaui kepentingan nasional individu (Archer, 2001).

Organisasi internasional memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari entitas lain. Anggota organisasi internasional dapat terdiri dari negara-negara berdaulat, organisasi regional, atau aktor non-negara. Tujuan utama dari organisasi ini biasanya bersifat spesifik, seperti menciptakan perdamaian, mendukung pembangunan ekonomi, atau melestarikan lingkungan (Claude, 1971). Organisasi internasional juga memiliki struktur formal, dengan badan-badan pengambil keputusan serta mekanisme administrasi yang terorganisasi dengan baik (Archer, 2001). Selain itu, organisasi ini beroperasi lintas batas negara yang memungkinkan kolaborasi dalam melibatkan banyak pihak di berbagai wilayah.

Terdapat dua jenis utama organisasi internasional. Yang pertama adalah Organisasi Antarpemerintah (*Intergovernmental Organizations* atau IGO), yang dibentuk oleh negara-negara untuk bekerja sama dalam isu-isu tertentu, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kemudian yang kedua adalah Organisasi Non-Pemerintah Internasional (*International Non-Governmental Organizations* atau INGO), yang didirikan oleh individu atau kelompok non-negara untuk menangani isu-isu global seperti bantuan kemanusiaan atau pelestarian lingkungan, dengan contoh seperti *Greenpeace*.

Dalam perannya, Clive Archer (2001) menjelaskan bahwa terdapat tiga utama peran dari organisasi internasional, yaitu :

1. Instrumen

Peran organisasi internasional sebagai instrumen merupakan peran dimana organisasi internasional sebagai alat yang digunakan oleh negara anggota secara formal untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan kebijakan politik luar negerinya melalui kebijakan masing-masing negara anggota.

2. Arena

Peran organisasi internasional sebagai arena adalah peran organisasi internasional sebagai wadah atau forum pertemuan negara-negara anggota untuk berdiskusi, berdebat, dan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi.

3. Aktor

Peran organisasi internasional sebagai aktor merupakan peran organisasi internasional sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan sendiri tanpa campur tangan oleh kekuasaan maupun paksaan dari luar organisasi termasuk negara anggotanya.

Dalam menjalankan perannya organisasi internasional menghadapi beberapa tantangan atau hambatan. Archer (2001) mengidentifikasi beberapa hambatan yang dihadapi oleh organisasi internasional dalam menjalankan perannya adalah sebagai berikut:

1. Hambatan Birokrasi

Birokrasi yang rumit dapat menghambat efisiensi dan efektivitas organisasi internasional termasuk dalam menciptakan kerjasama antara sesama anggota organisasi maupun antar organisasi internasional.

2. Hambatan Lingkungan

Hambatan lingkungan adalah hambatan yang dihadapi oleh organisasi internasional dari lingkungan internal maupun eksternal suatu organisasi internasional. Hal ini termasuk pada situasi maupun kondisi lingkungan masyarakat internasional.

3. Hambatan Otonomi

Organisasi internasional sering kali memiliki otonomi terbatas yang membatasi kemampuan mereka dalam mengambil keputusan tanpa campur tangan negara anggota.

4. Hambatan Keuangan

Keterbatasan sumber daya baik dalam hal dana, keterbatasan waktu hingga sumber dapat menghambat operasional dan efektivitas organisasi internasional.

Metode

Tulisan ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana hambatan yang dihadapi oleh UNICEF dalam memenuhi hak pendidikan anak di Afghanistan pada tahun 2021-2023. Jenis data sekunder data sekunder dalam bentuk artikel, buku, surat kabar, jurnal, dan informasi dari situs web terpercaya yang relevan dengan penelitian, dengan teknik pengumpulan data *library research* atau studi kepustakaan berbagai literatur. Dan teknik analisis data berupa kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Pendidikan Pasca Taliban Berkuasa

Setelah jatuhnya rezim Taliban pada tahun 2001, pendidikan di Afghanistan mengalami kemajuan yang signifikan selama dua dekade berikutnya. Pemerintah baru, dengan dukungan dari organisasi internasional seperti UNICEF dan USAID, berhasil meningkatkan akses pendidikan secara drastis. Pada 2001, hanya sekitar 900.000 anak yang bersekolah dan hampir seluruhnya laki-laki. Namun, pada 2019, angka ini meningkat menjadi 9,2 juta, dengan 39% diantaranya adalah perempuan (UNICEF, 2021). Ribuan sekolah dibangun, kurikulum baru diterapkan, dan pelatihan guru diperluas. Meski demikian, kemajuan ini menghadapi tantangan besar, termasuk ancaman keamanan di wilayah konflik,

bias gender yang terus mengakar, dan korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan (World Bank, 2020).

Namun, setelah Taliban kembali menduduki kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021, sistem pendidikan di negara ini kembali memburuk. Kebijakan pendidikan yang sebelumnya terbuka untuk semua anak dan mencoba mengakomodasi pendidikan untuk menyeluruh, terpengaruh oleh aturan yang ketat dan diskriminatif. Pasca-Taliban menduduki pemerintahan, pendidikan di Afghanistan menghadapi tantangan yang besar, terutama dalam hal aksesibilitas dan kesetaraan gender.

Kebijakan utama yang diterapkan oleh Taliban pada tahun 2021 adalah pembatasan pendidikan bagi anak perempuan. Taliban membatasi kegiatan anak-anak perempuan di kelas-kelas tingkat dasar, menengah, dan pasca-menengah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mewajibkan sekolah untuk menyediakan pintu masuk terpisah untuk siswa laki-laki dan perempuan.
2. Anak perempuan hanya boleh diajar oleh guru perempuan.
3. Kelas campuran gender hanya boleh jika jumlah siswa perempuan di dalam kelas di bawah 15 orang.
4. Mewajibkan adanya tirai untuk memisahkan siswa laki-laki dan perempuan di kelas campuran gender.
5. Melarang anak perempuan dari pendidikan tingkat menengah (SIGAR, 2023).

Hal ini bertentangan dengan kemajuan yang telah dicapai dalam bidang pendidikan selama dua dekade sebelumnya, dimana perempuan diberikan akses untuk bersekolah dan mengakses pendidikan tinggi.

Pada awal pengambilalihan, Taliban berjanji bahwa mereka akan mengizinkan anak perempuan untuk kembali bersekolah dengan ketentuan bahwa lingkungan pendidikan tersebut akan sesuai dengan interpretasi mereka terhadap hukum Islam. Namun, pada bulan Maret 2022 Taliban menutup sekolah menengah untuk perempuan dan menangguk akses mereka terhadap pendidikan lanjutan. Kemudian pada Desember 2022, Taliban mengumumkan kebijakan baru yang melarang perempuan menghadiri kelas universitas atau menghadiri sekolah swasta tingkat atas. Pada Agustus 2023, Taliban mengeluarkan kebijakan baru yang melarang perempuan bepergian ke Uni Emirat Arab untuk mengejar pendidikan pasca-sekolah menengah (SIGAR, 2023).

Sementara itu, pendidikan dasar untuk anak-anak usia sekolah dasar tetap diizinkan, meskipun ada pembatasan tertentu, seperti pemisahan gender dalam ruang kelas dan penerapan kurikulum tradisional. Materi ajar difokuskan pada nilai-nilai Islam dengan interpretasi Taliban, dengan sedikit penekanan pada keterampilan modern yang sebelumnya diajarkan di bawah pemerintahan sebelumnya.

Keputusan Taliban untuk menutup akses pendidikan bagi anak perempuan di tingkat menengah dan perguruan tinggi memiliki dampak yang sangat besar terhadap masa depan perempuan di Afghanistan. Ribuan anak perempuan yang sebelumnya berada di tingkat sekolah menengah atau perguruan tinggi terpaksa menghentikan pendidikan mereka, yang menyebabkan penurunan signifikan dalam jumlah perempuan yang memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini sangat signifikan. Tanpa pendidikan yang memadai, banyak perempuan akan kehilangan peluang untuk bekerja di sektor formal, yang akan memperburuk ketidaksetaraan gender dan membatasi potensi ekonomi negara. Di sisi lain, meskipun pendidikan dasar tetap dapat diakses oleh anak-anak perempuan, banyak orang tua yang khawatir dan ragu untuk mengirimkan anak perempuan mereka ke sekolah karena takut akan kekerasan, intimidasi, atau larangan yang lebih ketat di masa depan.

Menurut data dari UNICEF, bahwa pada tahun 2023 sekitar 60% dari 14 juta anak di Afghanistan masih belum terakses pendidikan yang memadai, dan krisis ekonomi yang

sedang melanda Afghanistan semakin memperburuk kondisi ini. Sebelum pengambilalihan Taliban, lebih dari 9 juta anak terdaftar di sekolah-sekolah di seluruh Afghanistan. Namun, setelah Taliban kembali berkuasa, sekitar 1 juta anak perempuan yang sebelumnya bersekolah di tingkat menengah terpaksa berhenti bersekolah. Hal ini membuat banyak organisasi internasional terus mendesak Taliban untuk membuka kembali sekolah bagi anak perempuan dan menyediakan akses yang lebih besar bagi semua anak Afghanistan (UNICEF, 2023).

Upaya Pemerintah Afghanistan

Sebelum Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, pemerintah Afghanistan bekerja keras untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak di seluruh negeri. Pemerintah, bersama dengan berbagai mitra internasional seperti UNICEF dan UNESCO, berupaya membangun kembali sistem pendidikan yang hancur akibat perang selama beberapa dekade. Salah satu langkah utama adalah pembangunan ribuan sekolah di seluruh negeri untuk memastikan akses pendidikan bagi lebih banyak anak, termasuk perempuan. Pemerintah juga memperkenalkan kurikulum nasional baru yang lebih inklusif, mencakup pelajaran sains, matematika, dan seni, serta memberikan pelatihan kepada ribuan guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran (UNICEF, 2021).

Sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap hak pendidikan, pemerintah Afghanistan juga menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi diskriminasi gender dalam pendidikan. Salah satu kebijakan utama adalah kampanye kesadaran publik untuk mendorong keluarga di daerah pedesaan agar mengizinkan anak perempuan mereka bersekolah. Program beasiswa untuk anak perempuan juga diperkenalkan untuk meningkatkan partisipasi mereka di tingkat pendidikan tinggi. Upaya ini menunjukkan hasil positif, dengan jumlah anak perempuan yang terdaftar di sekolah meningkat dari hampir nol pada 2001 menjadi lebih dari 3,7 juta pada 2019 (World Bank, 2020).

Langkah penting lainnya adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Hak Anak pada tahun 2019. Kabinet Republik Islam Afghanistan pada tanggal 5 Maret 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Konstitusi Afghanistan, mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Anak yang berisi 16 Bab dan 108 Pasal. RUU ini juga merupakan komitmen Afghanistan terhadap standar internasional, seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi oleh Afghanistan pada tahun 1994, dan untuk mendapat dukungan komunitas global, termasuk UNICEF. Dalam undang-undang perlindungan hak anak oleh Afghanistan, hak pendidikan diatur di dalam Bab 7 dengan 9 Pasal. UU ini menjadi tonggak sejarah dalam upaya Afghanistan untuk melindungi hak anak-anak, termasuk hak atas pendidikan. Namun implementasi dari UU ini menghadapi tantangan besar, meskipun undang-undang ini dianggap sebagai kemajuan besar dalam melindungi hak anak. Di tingkat nasional, pemerintah Afghanistan berupaya membangun kerangka kerja institusional untuk memastikan penegakan hukum, termasuk mendirikan badan perlindungan anak dan melatih petugas terkait. Namun, situasi keamanan yang tidak stabil akibat konflik bersenjata terus menghambat upaya oleh Afghanistan, terutama di daerah pedesaan. Anak-anak masih rentan terhadap eksploitasi, termasuk perdagangan manusia, pekerja anak, dan perekrutan oleh kelompok bersenjata. Dalam sektor pendidikan, meskipun undang-undang menjamin hak atas pendidikan dasar gratis, banyak anak, terutama perempuan, tidak dapat mengakses sekolah karena faktor budaya, kemiskinan, atau ancaman keamanan.

Upaya pemerintah Afghanistan dalam melindungi hak pendidikan anak sebelum Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021 seringkali terganggu oleh kurangnya sumber daya keuangan dan dukungan logistik yang memadai. Sebagai negara yang bergantung pada bantuan internasional, anggaran pendidikan Afghanistan sangat rentan terhadap fluktuasi donor asing. Menurut laporan Bank Dunia (2020), hampir 75% dari anggaran nasional Afghanistan berasal dari bantuan internasional, sehingga ketergantungan ini sering menghambat keberlanjutan program pendidikan. Selain itu, konflik yang terus berlanjut

menyebabkan kerusakan infrastruktur sekolah, termasuk penghancuran bangunan, pengalihan fasilitas menjadi kamp militer, dan sulitnya distribusi buku pelajaran ke wilayah terpencil. Akibatnya, banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dasar seperti meja, kursi, dan perlengkapan belajar.

Selain keterbatasan keuangan, pemerintah juga menghadapi masalah logistik dalam melatih dan mempertahankan tenaga pengajar. Kekurangan guru yang terlatih, terutama di daerah pedesaan. Banyak guru berhenti mengajar karena gaji rendah atau ancaman keamanan di wilayah konflik (UNICEF, 2021). Hambatan ini membuat akses pendidikan tidak merata, dengan anak-anak di daerah pedalaman memiliki kemungkinan jauh lebih kecil untuk bersekolah dibandingkan anak-anak di kota besar.

Resistensi budaya juga menjadi tantangan signifikan, terutama terhadap pendidikan anak perempuan. Meskipun pemerintah telah berupaya memperkenalkan program kesetaraan gender, seperti kampanye kesadaran publik dan insentif pendidikan untuk anak perempuan, norma budaya patriarkal tetap mendominasi banyak komunitas di Afghanistan. Di beberapa daerah pedesaan, keluarga tidak memperbolehkan anak perempuan ke sekolah, terutama setelah mereka mencapai usia pubertas, karena dianggap melanggar tradisi atau nilai agama. Pernikahan dini juga menjadi penghalang utama bagi anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan, di mana 28% perempuan di Afghanistan menikah sebelum usia 18 tahun (UNICEF, 2019).

Sebelumnya, Pemerintah Afghanistan juga telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 2003, yang berisi kewajiban untuk memastikan penghapusan stereotip peran laki-laki dan perempuan di semua tingkatan pendidikan serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan pada anak perempuan, dan rutin menerima bantuan internasional untuk meningkatkan akses pendidikan untuk semua anak (Save the Children, 2021).

Selain itu, pemerintahan Afghanistan juga memiliki kebijakan pendidikan yang setara. Afghanistan telah berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang, termasuk anak-anak perempuan, dengan memberikan prioritas pada pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah Afghanistan juga telah berupaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, termasuk dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Upaya pemerintah Afghanistan dalam mengelola pendidikan telah terganggu secara signifikan sejak pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada Agustus 2021. Taliban melarang anak perempuan dari pendidikan menengah pada September 2021 yang mempengaruhi lebih dari 1,1 juta anak perempuan. Selain itu, Taliban juga melarang pendidikan tinggi atau universitas untuk perempuan pada Desember 2022 yang menyebabkan protes internasional (Church, 2023).

Kebijakan Taliban tersebut berdampak negatif pada kualitas pendidikan di Afghanistan. Perubahan kurikulum yang dilakukan oleh Taliban mengurangi kualitas pendidikan secara keseluruhan dengan mempersempit kurikulum yang ditawarkan kepada siswa Afghanistan. Sebelumnya, setelah rezim Taliban pertama kali digulingkan pada tahun 2001, pemerintah baru dengan dukungan internasional melakukan reformasi besar-besaran terhadap kurikulum pendidikan. Kurikulum yang sebelumnya sangat terbatas pada pelajaran agama Islam diperluas untuk mencakup semua mata pelajaran modern seperti matematika, sains, teknologi, dan bahasa asing. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda Afghanistan menghadapi tantangan global. Selain itu, kurikulum baru juga menekankan nilai-nilai kesetaraan gender, perdamaian, dan toleransi. Pelajaran yang memuat kekerasan atau doktrin ideologi ekstremis dihapus untuk mendorong perdamaian dan

rekonsiliasi nasional (World Bank, 2020). Buku pelajaran didesain ulang untuk menggambarkan perempuan sebagai kontributor penting dalam masyarakat, seperti ilmuwan, guru, atau pemimpin komunitas. Pemerintah, bekerja sama dengan organisasi internasional, juga melatih guru untuk mengadopsi pendekatan pengajaran yang berbasis pada hak anak dan menciptakan lingkungan belajar yang aman untuk semua (UNICEF, 2021).

Namun, setelah Taliban kembali berkuasa pada 2021, kurikulum pendidikan mengalami perubahan besar yang mencerminkan pandangan ideologi Taliban. Taliban kembali mempersempit fokus pendidikan dengan memprioritaskan studi agama Islam melalui interpretasi syariah mereka. Mata pelajaran sains, matematika tingkat lanjut, seni, dan pelajaran bahasa asing banyak yang dihapus atau dikurangi secara signifikan. Selain itu, materi tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perdamaian juga dihilangkan, digantikan dengan penekanan pada jihad, hukum Islam, dan norma tradisional konservatif. Pendidikan bagi anak perempuan di atas usia 12 tahun dilarang, sehingga mereka kehilangan akses terhadap pelajaran modern sama sekali (HRW, 2023). Hal ini mengkhawatirkan karena tanpa kurikulum yang baik siswa tidak akan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan penghasilan berkelanjutan dan Afghanistan tidak akan memiliki tenaga kerja terampil untuk mengembangkan ekonominya (SIGAR, 2023). Selain itu, hal ini juga menghambat kemampuan guru dalam mengajar kurikulum lanjutan serta menghambat keluarga untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah (Save the Children, 2022).

Kekurangan guru dan kualitas pendidikan juga menjadi masalah serius di Afghanistan. Pada tahun 2021, hanya 22% guru yang memenuhi kualifikasi dasar minimum tingkat 14 yang menunjukkan kekurangan guru secara signifikan. Infrastruktur dan kondisi sekolah di Afghanistan juga masih sangat kurang. Banyak sekolah yang masih tidak memiliki bangunan permanen, yaitu dengan kelas-kelas yang sering diadakan di tempat sementara dimana siswa berkumpul di luar ruangan. Afghanistan memiliki 15.000 lebih sekolah dan sekitar kurang lebih 700 sekolah telah ditutup. Dari total jumlah bangunan sekolah di Afghanistan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung yang layak akibat dari konflik yang terjadi. Kementerian Pendidikan Afghanistan melaporkan 7.000 sekolah kekurangan gedung, dan 5.000 sekolah tidak memiliki gedung sama sekali (UNICEF, 2021).

Krisis ekonomi dan kemiskinan juga berdampak negatif pada pendidikan. Hampir 50% keluarga di Afghanistan hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2020 yang membuat banyak anak harus memilih untuk bekerja daripada bersekolah. Selain itu, tidak sedikit jumlah anak-anak yang telah menjadi bagian dari pekerja anak di Afghanistan, dengan perkiraan sekitar 1 juta anak terlibat dalam pekerja anak (World Bank Group, 2021).

Kebijakan oleh Taliban juga membuat negara-negara Barat memberi sanksi dengan tidak lagi memberikan bantuan kepada Afghanistan, termasuk bantuan pendidikan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, dan Uni Eropa secara kolektif menghentikan sebagian besar bantuan keuangan mereka ke Afghanistan. Sebelum Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, Afghanistan sangat bergantung pada bantuan internasional, dengan sekitar 75% anggaran pemerintah berasal dari donasi internasional. Ketika kebijakan pembatasan pendidikan anak perempuan oleh Taliban mulai diberlakukan, bantuan yang sebelumnya mendukung berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, terhenti penyalurannya (World Bank, 2021).

Bantuan yang dihentikan mencakup dana langsung ke pemerintah Afghanistan yang digunakan untuk membayar gaji guru, membangun sekolah, dan menyediakan perlengkapan pendidikan seperti buku pelajaran dan perlengkapan sekolah. Amerika Serikat, misalnya, yang selama dua dekade menjadi donor terbesar Afghanistan, menghentikan miliaran dolar dana bantuan. Sebelumnya, bantuan Amerika Serikat melalui USAID secara signifikan mendukung pendidikan di Afghanistan, dengan fokus pada peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak-anak. Pada 2021, Amerika Serikat mengalokasikan lebih dari

USD 600 juta untuk berbagai proyek, termasuk pendidikan. Namun, pengalihan kekuasaan ke Taliban menyebabkan penghentian bantuan langsung, terutama karena pembatasan hak perempuan dan anak perempuan untuk bersekolah (SIGAR, 2022). Penghentian dana Amerika Serikat mengganggu proyek-proyek pembangunan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan distribusi buku pelajaran. Beberapa program yang semula dijalankan oleh lembaga donor kini tidak dapat beroperasi, memengaruhi lebih dari 9 juta siswa di seluruh negeri (HRW, 2023). Uni Eropa juga turut membekukan bantuan yang direncanakan untuk mendukung pendidikan, terutama pendidikan untuk anak perempuan (European Commission, 2021).

Selain itu, program-program pendidikan internasional yang melibatkan kerjasama dengan pemerintah Afghanistan, seperti beasiswa untuk siswa Afghanistan ke luar negeri atau pelatihan guru juga dihentikan. Kanada dan Jerman juga menghentikan proyek pembangunan sekolah dan program pelatihan guru perempuan yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi anak perempuan di sekolah (HRW, 2022).

Penghentian bantuan-bantuan ini memiliki dampak besar pada sistem pendidikan Afghanistan. Banyak sekolah kekurangan dana operasional, sementara gaji guru sering terlambat atau bahkan tidak dibayar. Di sisi lain, masyarakat internasional mengalihkan fokusnya ke bantuan kemanusiaan yang mendesak melalui badan-badan PBB dan LSM untuk memastikan bahwa bantuan tetap mencapai warga sipil, meskipun dampaknya terbatas karena distribusi ini tidak dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh bantuan langsung pemerintah. Kebijakan Taliban telah mengisolasi Afghanistan dari dukungan internasional yang sangat dibutuhkan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mudanya. Pemerintahan Afghanistan telah bekerja sama dengan organisasi internasional sebelum Taliban memerintah untuk meningkatkan akses pendidikan, termasuk bekerjasama dan menerima bantuan dari UNICEF.

UNICEF

UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) didirikan pada 11 Desember 1946 oleh Majelis Umum PBB. Awalnya organisasi ini dibentuk untuk menyediakan bantuan darurat berupa makanan, pakaian, dan perawatan medis bagi anak-anak yang terkena dampak Perang Dunia II. UNICEF mulai aktif di Afghanistan sejak 1949, tiga tahun setelah pendiriannya. Awalnya, UNICEF masuk melalui program bantuan untuk kesehatan dan pendidikan sebagai bagian dari upaya kemanusiaan global. Kehadiran UNICEF di Afghanistan merupakan permintaan dari pemerintah Afghanistan saat itu, yang membutuhkan dukungan dalam pengembangan layanan kesehatan dan pendidikan. Setelah invasi Uni Soviet pada 1979 dan selama konflik berkepanjangan, peran UNICEF menjadi semakin penting. Mereka memberikan bantuan darurat dan menjalankan program kesehatan, imunisasi, serta perlindungan anak, bahkan dalam situasi yang sangat berbahaya.

Tujuan utama UNICEF dalam sektor pendidikan di Afghanistan adalah memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Beberapa target utama UNICEF di sektor pendidikan meliputi:

1. Peningkatan Akses Pendidikan untuk Semua Anak
2. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan
4. Mempromosikan Kesetaraan Gender dalam Pendidikan
5. Meningkatkan Pendidikan untuk Anak-Anak yang Terkena Dampak Krisis

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, UNICEF menyusun program *Education* di Afghanistan dengan beberapa upaya demi pendidikan yang berkelanjutan bagi anak-anak. Beberapa program utama yang dijalankan oleh UNICEF di sektor pendidikan antara lain:

1. Program Pendidikan Dasar

UNICEF bekerja untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar di seluruh dunia. UNICEF aktif mendukung pembangunan sekolah dan menyediakan buku teks di daerah-daerah yang terdampak konflik. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke pendidikan dasar yang berkualitas serta membangun landasan keterampilan dan pengetahuan mereka.

Pada tahun 2021, UNICEF membuka kembali sekolah dasar pasca konflik yang rusak banyak infrastruktur pendidikan. Hingga pada tahun 2023, UNICEF telah merenovasi ratusan sekolah terutama di wilayah yang fasilitasnya terkena dampak konflik yang parah. Misalnya, di provinsi-provinsi seperti Kandahar, Herat, dan Nangarhar, di mana sekolah-sekolah berada dalam kondisi yang sangat buruk akibat konflik dan kekurangan dana. UNICEF juga telah menjangkau lebih dari 150.000 siswa, lebih dari setengahnya adalah anak perempuan, dalam distribusi bahan ajar. Sekolah-sekolah ini tidak hanya menawarkan pendidikan dasar, tetapi juga menyediakan guru dengan materi pendidikan dan pelatihan untuk menjamin kualitas pendidikan yang lebih baik (UNICEF, 2023).

2. Kembali ke Sekolah (*Back To School*)

Kembali ke Sekolah atau *Back To School* merupakan kampanye oleh UNICEF untuk memastikan anak-anak, terutama anak perempuan, dapat kembali ke pendidikan formal. Program ini juga termasuk rehabilitasi gedung sekolah yang rusak dan distribusi materi pendidikan. Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin bahwa anak-anak dapat kembali ke pendidikan formal karena dampak dari konflik atau krisis. Seperti halnya UNICEF membangun pusat pembelajaran akselerasi di Kandahar untuk membantu anak-anak yang mengungsi karena konflik agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.

UNICEF berhasil menjangkau lebih dari 200.000 anak termasuk anak perempuan melalui program ini. Program ini menjangkau anak-anak melalui sekolah berbasis komunitas, ruang belajar darurat, dan program pendidikan berbasis akselerasi. Tidak hanya itu, fasilitas baru juga ditingkatkan di banyak daerah agar lebih banyak anak perempuan dapat tetap di sekolah meski tantangan logistik dan budaya.

3. Pendidikan Darurat (*Education in Emergency*)

Education in Emergency (EiE) adalah respons pendidikan yang diberikan oleh UNICEF dan mitranya di tengah situasi darurat, termasuk konflik bersenjata, bencana alam, atau krisis lainnya. Program ini bertujuan untuk memastikan akses pendidikan inklusif dan berkualitas bagi anak-anak yang terdampak, dengan memberikan layanan pendidikan sementara, dukungan psikososial, dan perlindungan.

EiE menjadi sangat relevan setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada Agustus 2021. Konflik politik, ketidakstabilan ekonomi, dan diskriminasi berbasis gender mengakibatkan lebih dari 10 juta anak menghadapi ancaman putus sekolah. Pada 2023, situasi semakin kompleks dengan pembatasan terhadap pendidikan anak perempuan dan larangan kerja bagi perempuan di sektor non-pemerintah, termasuk pendidikan.

Program ini mencakup penyediaan *Community-Based Education* (CBE), yaitu pendidikan berbasis komunitas dengan membuka kelas belajar yang didirikan di berbagai tempat seperti gedung-gedung komunitas, rumah-rumah, atau di masjid, dan jumlah rata-rata siswa per kelas adalah 25-30 anak. Program ini memberikan akses pendidikan kepada semua anak, termasuk mereka yang berasal dari kelompok rentan seperti anak perempuan, anak-anak penyandang disabilitas, dan anak-anak dari komunitas terpencil memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Tujuan dari program ini adalah untuk menjangkau anak-anak yang tinggal di daerah-daerah terpencil dan daerah konflik, dimana akses ke sekolah formal sangat terbatas serta meningkatkan tingkat retensi dan kehadiran siswa di sekolah (UNICEF, 2020).

Setelah pengambilalihan pemerintahan oleh Taliban pada tahun 2021, UNICEF terus memperluas kelas CBE di daerah-daerah yang tidak memiliki akses ke sekolah formal. Pada tahun berikutnya, CBE menjadi solusi utama bagi anak-anak, terutama anak perempuan yang terdampak kebijakan oleh Taliban. Selain pendidikan akademis, program ini juga memberikan pelatihan keterampilan hidup dan lingkungan yang aman untuk belajar. Hingga pada tahun 2023, CBE mengoperasikan lebih dari 21.000 kelas CBE dan menjangkau lebih dari 686.000 anak di daerah yang sulit diakses, dengan fokus utama pada anak perempuan. UNICEF terus memiliki program pasokan pendidikan terbesar, mendistribusikan materi kelas, pengajaran, dan pembelajaran, tenda, dan buku teks ke CBE maupun sekolah umum kepada 6.340.373 siswa di Afghanistan. Dari jumlah tersebut, 5,7 juta adalah anak-anak di sekolah umum, 39% diantaranya adalah anak perempuan. Jumlah tersebut mencakup 4.380 siswa dan 49% anak perempuan yang didukung melalui distribusi sumber daya darurat setelah gempa bumi di Provinsi Herat pada Oktober 2023 (UNICEF, 2023).

Selain itu EiE juga menyediakan *Accelerated Learning Programme* (ALP) yaitu program yang dirancang untuk membantu anak-anak usia 10-15 tahun yang terputus dari pendidikan formal agar dapat kembali mendapatkan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan dasar. Tujuan dari program ini agar dapat menjangkau anak-anak yang kehilangan akses pendidikan karena berbagai alasan, seperti konflik, perpindahan, kemiskinan, atau diskriminasi gender. Program ini memungkinkan siswa menyelesaikan kurikulum yang dipercepat yang memungkinkan siswa dapat menyelesaikan beberapa tahun pendidikan yaitu enam tahun pendidikan dasar dalam waktu yang singkat menjadi tiga tahun. UNICEF memprioritaskan anak-anak di daerah terpencil, anak perempuan, dan kelompok rentan lainnya dan memberikan akses ke pendidikan berkualitas melalui pusat pembelajaran berbasis komunitas.

Kemudian EiE juga menyediakan pelatihan bagi guru demi meningkatkan kualitas pendidikan dengan fokus pada metode pengajaran yang modern dan inklusif. Pelatihan ini membantu guru dalam mengembangkan keterampilan mengajar mereka, termasuk metode pengajaran yang efektif, manajemen kelas, dan penggunaan alat bantu ajar modern. Kemudian karena banyaknya guru dan siswa di Afghanistan yang menghadapi trauma akibat konflik, pelatihan ini juga mencakup dukungan psikososial untuk membantu guru agar dapat memahami cara menangani stres dan trauma pasca konflik. Program ini juga dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak dari berbagai latar belakang, termasuk anak perempuan serta anak-anak berkebutuhan khusus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas.

Pada tahun 2022, UNICEF memberikan dukungan tunai kepada sekitar 194.000 guru sekolah umum untuk mengatasi krisis ekonomi. Setiap guru menerima \$ 120 per bulan sebagai upah, yang memungkinkan mereka untuk terus mengajar meskipun menghadapi tekanan finansial. UNICEF melatih lebih dari 10.000 guru komunitas, termasuk guru perempuan yang dikeluarkan dari sekolah formal (UNICEF, 2022).

Melalui program EiE, UNICEF juga menyediakan infrastruktur darurat yaitu dengan membangun sekolah berbasis komunitas dalam bentuk tenda dan bangunan semi-permanen untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah konflik dan pengungsian. Program ini ditujukan terutama untuk populasi yang terlantar akibat konflik atau bencana alam, seperti banjir dan gempa bumi. UNICEF terus berupaya memastikan bahwa pendidikan tetap berlanjut meskipun dalam kondisi darurat. Di beberapa sekolah darurat, UNICEF meningkatkan fasilitas sanitasi dengan membangun toilet, menyediakan air bersih, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sehat. Hal ini penting untuk mendorong kehadiran siswa, terutama anak perempuan, yang sering absen karena kurangnya fasilitas sanitasi yang memadai.

4. Program Pendidikan Untuk Anak Perempuan (GATE)

Girls' Access to Education atau disingkat GATE merupakan program UNICEF dengan fokus pada pendidikan anak perempuan, dengan program-program yang bertujuan mengurangi hambatan budaya dan ekonomi yang menghalangi akses mereka pada pendidikan. Melalui program ini, UNICEF mendukung pelatihan selama dua tahun untuk para calon guru perempuan dan pelatihan tentang metode pengajaran, desain kurikulum, serta cara menginspirasi siswa perempuan dengan harapan dapat meningkatkan jumlah guru perempuan di Afghanistan, terutama di sekolah-sekolah pedesaan yang seringkali kekurangan tenaga pengajar dan dengan fokus pada daerah-daerah dengan budaya patriarkal yang masih berkembang seperti Kandahar. (UNICEF USA, 2019). Pada tahun 2021, lebih dari 1.060 perempuan telah dilatih sebagai guru di bawah program GATE, membantu anak perempuan yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pendidikan formal.

Taliban secara umum menerima program-program oleh UNICEF, tetapi dengan pembatasan tertentu. Misalnya, Taliban mendukung program pendidikan dasar untuk anak laki-laki dan anak perempuan di bawah usia 12 tahun. Namun, pembatasan ketat diterapkan pada pendidikan bagi anak perempuan di atas usia tersebut. Sebagian besar upaya UNICEF untuk mendukung pendidikan anak perempuan, seperti penyediaan fasilitas sekolah menengah dan pelatihan guru perempuan, harus dilakukan dengan hati-hati atau bahkan secara diam-diam. Pada tahun 2022, UNICEF meluncurkan CBE yaitu kelas informal yang berlokasi di desa-desa dan diorganisir oleh masyarakat setempat. Program ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan bagi anak perempuan tanpa menarik perhatian Taliban (UNICEF, 2022). Pada tahun 2021 hingga 2023, UNICEF juga terus bernegosiasi dengan Taliban untuk membuka kembali sekolah menengah bagi anak perempuan. Meskipun negosiasi ini belum membuahkan hasil, UNICEF terus menyerukan kepada komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Taliban agar mencabut larangan tersebut.

Program *Education* oleh UNICEF di Afghanistan, seperti *Community-Based Education* (CBE), *Education in Emergencies* (EiE), *Back to School*, *Girls' Access to Education* (GATE), dan *Accelerated Learning Program* (ALP), telah beroperasi dengan berbagai tingkat penerimaan dari otoritas Taliban. UNICEF telah menerima jaminan dari Kementerian Pendidikan Taliban bahwa kelas berbasis komunitas yang menaungi sekitar 500.000 siswa akan dilanjutkan.

Namun, pelaksanaan program-program ini menghadapi tantangan signifikan. Keputusan Taliban untuk melarang perempuan Afghanistan bekerja dengan organisasi internasional termasuk UNICEF telah menghambat kemampuan organisasi tersebut dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan layanan pendidikan. Larangan ini memperburuk krisis kemanusiaan di Afghanistan, di mana lebih dari 28 juta orang, termasuk lebih dari 15 juta anak-anak, membutuhkan bantuan kemanusiaan. Selain itu, pembatasan akses pendidikan bagi anak perempuan, terutama di tingkat pendidikan menengah, telah menyebabkan lebih dari satu juta anak perempuan kehilangan hak untuk melanjutkan pendidikan. Meskipun UNICEF, bersama mitra-mitranya, menyediakan pendidikan berbasis komunitas untuk sekitar 600.000 anak, tantangan tetap ada dalam memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua anak di Afghanistan.

Dalam melakukan upaya-upayanya, UNICEF tidak bekerja sendirian demi mencapai tujuan pendidikan di Afghanistan. Kerjasama dengan pemerintah Afghanistan dan berbagai organisasi internasional sangat penting untuk keberhasilan program-program pendidikan ini. Beberapa bentuk kerjasama antara UNICEF, pemerintah, dan organisasi internasional meliputi:

1. Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Afghanistan

UNICEF bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Afghanistan sebagai mitra teknis dan operasional untuk mendukung pengembangan dan implementasi program pendidikan. Dalam kerjasama ini, UNICEF memberikan dukungan teknis dalam merancang

kurikulum yang mencakup nilai-nilai seperti kesetaraan dan perdamaian, serta pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. UNICEF juga berperan dalam menyediakan sumber daya pendidikan, seperti buku pelajaran, perlengkapan sekolah, dan fasilitas kelas darurat, terutama di daerah yang terdampak oleh konflik. Selain itu, UNICEF terlibat dalam advokasi kebijakan untuk memprioritaskan pendidikan anak, termasuk upaya peningkatan partisipasi anak perempuan dalam pendidikan. Program-program pendidikan nonformal juga dilaksanakan untuk anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, dan UNICEF membantu Kementerian Pendidikan dalam pemantauan dan evaluasi program pendidikan. Namun, sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021, kolaborasi ini dihadapkan pada tantangan besar, terutama terkait kebijakan yang membatasi pendidikan anak perempuan, di mana UNICEF beradaptasi untuk tetap memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak tanpa melanggar prinsip hak asasi manusia yang menjadi landasan kerjanya (UNICEF, 2023).

2. Koordinasi dengan Organisasi Internasional Lainnya

UNICEF bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNESCO, Bank Dunia, USAID, dan lembaga bantuan kemanusiaan lainnya untuk mengatasi krisis pendidikan di Afghanistan, terutama setelah perubahan pemerintahan yang membatasi pendidikan bagi anak perempuan.

UNICEF bersama mitra internasional memberikan bantuan signifikan di bidang pendidikan di Afghanistan, terutama bagi anak-anak perempuan yang menghadapi pembatasan pendidikan akibat kebijakan pemerintah *de facto*. Salah satu program utama adalah pendidikan berbasis komunitas yang bekerja sama dengan UNESCO. Program ini membuka ruang belajar di desa-desa terpencil, merekrut guru setempat, dan menjangkau lebih dari 500.000 anak perempuan dan laki-laki. UNICEF juga bekerja sama dengan Bank Dunia untuk memperkenalkan pembelajaran jarak jauh melalui radio, televisi, dan platform digital, didukung oleh distribusi buku panduan belajar di rumah kepada keluarga. Selain itu, UNICEF dan USAID meluncurkan program transfer tunai pertama pada tahun 2022-2023 yang menjangkau lebih dari 86.000 rumah tangga guna mendukung keluarga yang kesulitan ekonomi agar tetap menyekolahkan anak-anak mereka. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengajaran, lebih dari 10.000 guru perempuan dilatih melalui kerja sama dengan UNESCO dan USAID, dengan fokus pada metode pembelajaran inklusif dan pengelolaan trauma siswa. Bersama dengan IOM, UNICEF mendukung relokasi siswa perempuan ke Rwanda untuk melanjutkan pendidikan di sekolah seperti *School of Leadership Afghanistan (SOLA)*. Selain itu, UNICEF dan mitra membangun dan memperbaiki lebih dari 1.200 ruang kelas sementara serta menyediakan perlengkapan belajar seperti meja, buku, dan alat tulis untuk ratusan ribu siswa. Secara keseluruhan, kolaborasi ini memberikan pendidikan kepada lebih dari 3 juta anak, memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas di tengah tantangan besar, terutama bagi anak perempuan.

Pada 2023, Uni Eropa telah mengalokasikan €25 juta kepada UNICEF untuk meningkatkan lingkungan belajar bagi 200.000 anak perempuan dan laki-laki di sekolah dasar negeri di Afghanistan. Dengan sumbangan ini, UNICEF meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah yang ada di 385 sekolah dasar negeri. Termasuk memulihkan ruang kelas, membangun fasilitas sanitasi yang peka gender, dan tembok pembatas sekolah (UNICEF, 2023).

Selain itu UNICEF juga mendapatkan dukungan dari negara-negara lain seperti Jepang. Pemerintah Jepang, melalui Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA), telah memberikan US\$ 10 juta untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran anak-anak di tengah krisis pembelajaran di Afghanistan pada Juli 2023. Dengan sumbangan ini, 71.500 anak diharapkan dapat melanjutkan pendidikan mereka (UNICEF, 2023).

Meskipun banyak tantangan yang dihadapi oleh UNICEF dalam melindungi hak pendidikan anak di Afghanistan, kolaborasi ini memastikan bahwa hak atas pendidikan tetap terpenuhi, bahkan di tengah situasi sosial dan politik yang kompleks di Afghanistan.

3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

UNICEF juga berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah (LSM) lokal dan masyarakat setempat untuk melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan. Ini termasuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan budaya dan sosial yang mungkin menghalangi anak-anak, terutama anak perempuan, untuk bersekolah.

UNICEF bekerja sama dengan LSM dan komunitas setempat untuk mengelola sekolah berbasis komunitas dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung anak perempuan. ALC menjadi salah satu inisiatif penting, yang dirancang untuk anak-anak yang terlambat mendapatkan pendidikan, termasuk anak-anak pengungsi atau mereka yang terdampak konflik. Pendekatan berbasis komunitas ini juga membantu mengatasi hambatan budaya yang menghalangi anak perempuan bersekolah.

Hambatan yang di hadapi UNICEF dalam melindungi hak pendidikan anak di Afghanistan tahun 2021-2023

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi UNICEF dalam melindungi hak pendidikan anak di Afghanistan sangat berdampak luas terhadap seluruh program yang dijalankan, khususnya setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada tahun 2021. Salah satu hambatan terbesar adalah hambatan birokrasi, hambatan ini sering kali dianggap sebagai salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh organisasi internasional. Struktur birokrasi yang rumit dapat menurunkan efisiensi dan efektivitas organisasi, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks organisasi internasional, birokrasi ini dapat menciptakan ketidakefisienan yang signifikan, terutama ketika proses administrasi memerlukan waktu yang lama, persetujuan berlapis-lapis, dan peraturan yang kaku.

Hambatan birokrasi ini muncul dari kebijakan Taliban yang melarang anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan di atas kelas enam. Kebijakan ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi juga secara langsung menghalangi akses pendidikan bagi jutaan anak perempuan di Afghanistan dan memperburuk kesenjangan gender dalam pendidikan. Data UNICEF menunjukkan bahwa sejak Taliban kembali berkuasa, sekitar 1,1 juta anak perempuan dilarang bersekolah di tingkat menengah, yang berdampak buruk pada beberapa program utama UNICEF, termasuk Program Pendidikan Dasar, Kembali ke Sekolah (*Back To School*), dan Program Pendidikan untuk Anak Perempuan (GATE). Meski UNICEF telah melakukan berbagai upaya, seperti negosiasi dengan otoritas lokal, kebijakan ini tetap menjadi penghalang utama yang sulit ditembus, menghambat upaya untuk mencapai pendidikan yang setara bagi semua anak di Afghanistan.

Tidak hanya itu, hambatan birokrasi juga muncul dari internal UNICEF, dimana hal ini mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pendidikan. Proses perencanaan yang panjang sering kali menghambat respons cepat terhadap krisis pendidikan di Afghanistan. Padahal, situasi di Afghanistan membutuhkan penanganan yang cepat untuk menjangkau anak-anak yang terancam putus sekolah akibat konflik dan kebijakan diskriminatif.

Selain itu, hambatan lingkungan yaitu hambatan lingkungan yang muncul baik dari lingkungan internal dan eksternal organisasi internasional. Lingkungan internal merujuk pada dinamika dalam organisasi itu sendiri, seperti konflik internal antar anggota atau ketidaksetujuan dalam cara organisasi seharusnya dijalankan. Di sisi lain, hambatan eksternal berhubungan dengan situasi di luar organisasi internasional, termasuk kondisi sosial, politik, dan ekonomi global yang lebih luas.

Kondisi lingkungan Afghanistan yang terus menghadapi konflik dan ketidakstabilan politik menjadi hambatan yang signifikan bagi UNICEF. Keamanan yang buruk di banyak daerah membuat akses ke wilayah yang paling membutuhkan bantuan pendidikan menjadi sangat terbatas. Menurut laporan dari Human Rights Watch, lebih dari 4 juta anak Afghanistan, terutama anak perempuan, tidak bersekolah pada tahun 2022 karena ketidakstabilan keamanan ini. Kondisi ini secara langsung mengganggu pelaksanaan program Pendidikan Darurat (*Education in Emergency*) dan Pendidikan Berbasis Komunitas (*Community Based Education*), di mana banyak sekolah yang ditutup atau rusak akibat serangan teroris atau operasi militer. Ketakutan akan kekerasan membuat banyak keluarga enggan mengirim anak-anak mereka ke sekolah, dan bahkan jika sekolah tetap beroperasi, lingkungan belajar yang tidak aman dan minim fasilitas menghambat proses pembelajaran yang efektif.

Hambatan otonomi yaitu hambatan yang mengacu pada keterbatasan yang dihadapi oleh organisasi internasional dalam hal pengambilan keputusan yang independen. Banyak organisasi internasional meskipun memiliki mandat dan tujuan tertentu, sering kali terhambat oleh intervensi atau tekanan dari negara-negara anggota mereka. Negara-negara ini sering kali memiliki kekuatan politik atau ekonomi yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh organisasi tersebut.

Hambatan otonomi yang dihadapi oleh UNICEF sangat berkaitan dengan birokrasi yang telah dibuat oleh Taliban. Dimana UNICEF sangat dibatasi dalam menerapkan kebijakan global mereka. Salah satu kebijakan global mereka adalah mendirikan sistem pendidikan formal, namun kebijakan Taliban yang melarang anak perempuan untuk bersekolah di tingkat menengah membuat UNICEF mencari alternatif lain seperti mendirikan sekolah informal atau mengembangkan program pendidikan berbasis komunitas. Meskipun solusi ini membantu, mereka tetap tidak mampu sepenuhnya menggantikan sistem pendidikan formal yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak di Afghanistan. Hal ini berdampak luas pada berbagai program pendidikan UNICEF, tidak hanya menghambat akses, tetapi juga kualitas pendidikan yang dapat diberikan.

Kemudian hambatan keuangan juga menjadi masalah utama yang dihadapi oleh banyak organisasi internasional. Keterbatasan dana dapat menghambat kemampuan organisasi untuk melaksanakan program atau proyek mereka secara penuh. Organisasi internasional sering kali bergantung pada kontribusi keuangan dari negara-negara anggotanya dan ketergantungan ini dapat menimbulkan masalah ketika negara anggota tidak dapat memenuhi kewajiban finansial mereka. Selain dana, keterbatasan waktu dan sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam operasional organisasi.

Hambatan keuangan ini menjadi tantangan besar lainnya yang membatasi kemampuan UNICEF dalam menjalankan program-programnya dengan optimal. Krisis ekonomi yang sedang terjadi di Afghanistan setelah pengambilalihan Taliban, ditambah dengan sanksi internasional dan pembekuan aset, menyebabkan pendanaan untuk program-program kemanusiaan, termasuk pendidikan, menjadi sangat terbatas. Pada tahun 2022, UNICEF melaporkan defisit dana lebih dari \$2 miliar untuk program-program kemanusiaan di Afghanistan, termasuk pendidikan. Kekurangan dana ini berdampak serius pada kemampuan UNICEF untuk mendukung infrastruktur pendidikan, melatih guru, serta menyediakan bahan ajar yang memadai. Program seperti Pelatihan Guru dan upaya UNICEF untuk menyediakan sumber daya pendidikan sangat terdampak oleh kekurangan dana ini, yang membuat UNICEF seringkali kesulitan membuat prioritas yang harus memilih antara mendanai pendidikan atau kebutuhan kemanusiaan lainnya, seperti kesehatan dan gizi anak-anak.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini tidak hanya mempengaruhi satu program saja, tetapi hampir semua program yang dilakukan UNICEF di Afghanistan. Dari kebijakan

birokrasi yang represif, ketidakstabilan lingkungan, keterbatasan otonomi organisasi, hingga kekurangan pendanaan, semuanya berkontribusi pada tantangan besar yang dihadapi UNICEF dalam memastikan hak pendidikan bagi anak-anak di Afghanistan. Meskipun ada beberapa alternatif dan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, hasilnya tetap tidak dapat menggantikan sistem pendidikan formal yang dihambat oleh kondisi politik, keamanan, dan ekonomi di Afghanistan. Hambatan-hambatan ini menyoroti betapa kompleks dan sulitnya tugas UNICEF dalam memperjuangkan pendidikan yang setara dan berkualitas di tengah situasi darurat dan krisis yang berkepanjangan.

Kesimpulan

Pendidikan di Afghanistan terhambat oleh beberapa hal yaitu rusaknya infrastruktur, perpindahan penduduk, ancaman kekerasan, kekurangan guru terlatih, serta kurikulum yang tidak memadai. Selain itu, konflik juga membawa dampak psikologis yang signifikan, seperti trauma dan gangguan emosional pada anak-anak, yang semakin menghambat perkembangan pendidikan anak-anak.

Upaya pemerintah Afghanistan sebelum pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban, serta intervensi internasional melalui UNICEF, telah mencoba untuk mengatasi hambatan ini. Namun, perubahan politik dan kebijakan yang dilakukan oleh Taliban telah memperburuk situasi pendidikan, terutama bagi anak perempuan yang dilarang melanjutkan pendidikan setelah kelas enam. Hambatan yang dihadapi UNICEF dalam melindungi hak pendidikan anak di Afghanistan sangat kompleks, termasuk hambatan politik, infrastruktur yang rusak, kekurangan dana, dan stigma sosial yang kuat.

Daftar Pustaka

- Amnesty International. (2021). *Afghanistan: Taliban must allow girls to return to school immediately – new testimony*. [daring] Tersedia di: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/afghanistan-taliban-must-allow-girls-to-return-to-school-immediately-new-testimony/>
- Archer, C. (2001). *International Organization, Third Edition*. London: Routledge.
- Child and Armed Conflict. (2023). *Afghanistan: A dire situation for children due to a lack of access to basic services and increased vulnerabilities*. [daring] Tersedia di: <https://childrenandarmedconflict.un.org/2023/12/afghanistan-a-dire-situation-for-children-due-to-a-lack-of-access-to-basic-services-and-increased-vulnerabilities/#>
- Church, A. (2023). *'No Girl Left Behind': How Taliban's Ban on Girls' Education Imperils Afghanistan's Future*. [daring] Tersedia di: <https://un-aligned.org/human-rights/how-talibans-ban-on-girls-education-imperils-afghanistans-future/>
- Handley, E. (2023). *Calls for Taliban to let Afghan girls return to high school as boys' classes resume*. [daring] Tersedia di: <https://www.abc.net.au/news/2023-03-23/afghanistan-taliban-ban-high-school-girls-education-impacts/102107162>
- Human Rights Watch. (2023). *"Schools are Failing Boys Too" The Taliban's Impact on Boys' Education in Afghanist*. [daring] Tersedia di: <https://www.hrw.org/report/2023/12/06/schools-are-failing-boys-too/talibans-impact-boys-education-afghanistan>
- Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Justice. (2019). *Law on Protection of Child Rights*. [daring] Tersedia di: <https://www.unicef.org/afghanistan/media/3936/file/Law%20on%20Protection%20of%20Child%20Rights.pdf>
- Putranto, E. D. (2023). *Minim Gedung Sekolah, Anak Afghanistan Belajar di Tempat Terbuka*. [daring] Tersedia di:

- <https://visual.republika.co.id/berita/s5bscs375/minim-gedung-sekolah-anak-afghanistan-belajar-di-tempat-terbuka>
- SIGAR. (2023). *SIGAR 24-01 Evaluation Report*. [daring] Tersedia di: <https://www.sigar.mil/pdf/evaluations/SIGAR-24-01-IP.pdf>
- UNESCO. (2024). *Protecting Education for All Afghans*. [daring] Tersedia di: <https://www.unesco.org/en/emergencies/education/afghanistan>
- UNESCO. (2021). *The right to education: what's at stake in Afghanistan? A 20-year review*. [daring] Tersedia di: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378911>
- UNICEF Afghanistan. (2019). *Accelerated learning centers transform girls live: Restoring hope to girls' and young women lives*. [daring] Tersedia di: <https://www.unicef.org/afghanistan/stories/accelerated-learning-centers-transform-girls-lives>
- UNICEF Afghanistan. (2023). *Emergency Education Response for Afghanistan (EERA)*. [daring] Tersedia di: <https://www.unicef.org/afghanistan/documents/emergency-education-response-afghanistan-eera>
- UNICEF Afghanistan. (2023). *Learning to read, daring to dream*. [daring] Tersedia di: <https://www.unicef.org/afghanistan/stories/learning-read-daring-dream>
- UNICEF. (2022). *UNICEF Afghanistan Country Office Annual Report 2022*. [daring] Tersedia di: <https://www.unicef.org/reports/country-regional-divisional-annual-reports-2022/Afghanistan>
- UNICEF. (2023). *Afghanistan Humanitarian Situation Report No. 10*. [daring] Tersedia di: [https://www.unicef.org/afghanistan/media/9051/file/UNICEF Afghanistan Humanitarian Situation Report No. 10, October 1-31 2023.pdf](https://www.unicef.org/afghanistan/media/9051/file/UNICEF_Afghanistan_Humanitarian_Situation_Report_No._10,_October_1-31_2023.pdf)
- UNICEF USA. (2019). *Getting Girls Back To School In Afghanistan*. [daring] Tersedia di: <https://www.unicefusa.org/stories/getting-girls-back-school-afghanistan>
- UNICEF USA. (2024). *1,000 Days Of Education Lost For Afghanistan's Girls*. [daring] Tersedia di: <https://www.unicefusa.org/stories/1000-days-education-lost-afghanistans-girls>
- World Bank Group. (2021). *Afghanistan Development Update April 2021*. [daring] Tersedia di: <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e406b6f24c2b7fdeb93b56c3116ed8f1-0310012021/original/Afghanistan-Development-Update-FINAL.pdf>